

ABSTRAK

Meskipun keterwakilan perempuan di DPRK Aceh Tengah telah memenuhi kuota 30%, peran mereka dalam fungsi legislasi masih belum optimal. Ini menunjukkan bahwa keterwakilan secara jumlah belum sejalan dengan keterlibatan secara substansi dalam proses perumusan kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi di DPRK Aceh Tengah tahun 2024 serta apa saja hambatan anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi di DPRK Aceh Tengah. Metode penelitian yang digunakan pendekatan kualitatif deskriptif, maksudnya pendekatan ini menjelaskan yang mana Teknik pengumpulan datanya melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Meskipun keterwakilan perempuan di DPRK Aceh Tengah telah memenuhi kuota 30%, peran mereka dalam fungsi legislasi belum berjalan optimal. Ini menunjukkan perlunya kajian lebih lanjut terhadap hambatan yang dihadapi dalam menjalankan peran legislasi secara efektif.

Kata Kunci : Keterwakilan perempuan, fungsi legislasi,

ABSTRACT

Although women's representation in the Central Aceh DPRK has met the 30% quota, their role in the legislative function is still not optimal. This shows that representation in terms of numbers is not yet in line with substantive involvement in the policy-making process. This study aims to analyze the role of women in carrying out the legislative function in the Central Aceh DPRK in 2024 and the obstacles faced by female council members in carrying out the legislative function in the Central Aceh DPRK. The research method used is a descriptive qualitative approach, meaning that this approach explains which data collection techniques were used, namely observation, interviews, and documentation. The results of the study show that although women's representation in the Aceh Tengah DPRK has met the 30% quota, their role in the legislative function has not been optimal. This indicates the need for further study on the obstacles faced in carrying out the legislative role effectively.

Keywords: *Women's representation, legislative functions,*